

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan daerah yang dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Dari PAD yang terus meningkat setiap tahunnya dapat dikatakan bahwa daerah tersebut dapat melakukan desentralisasi fiskal. Sedangkan apabila PAD mengalami penurunan maka pemerintah daerah bergantung terhadap pemerintah pusat. Peningkatan PAD DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

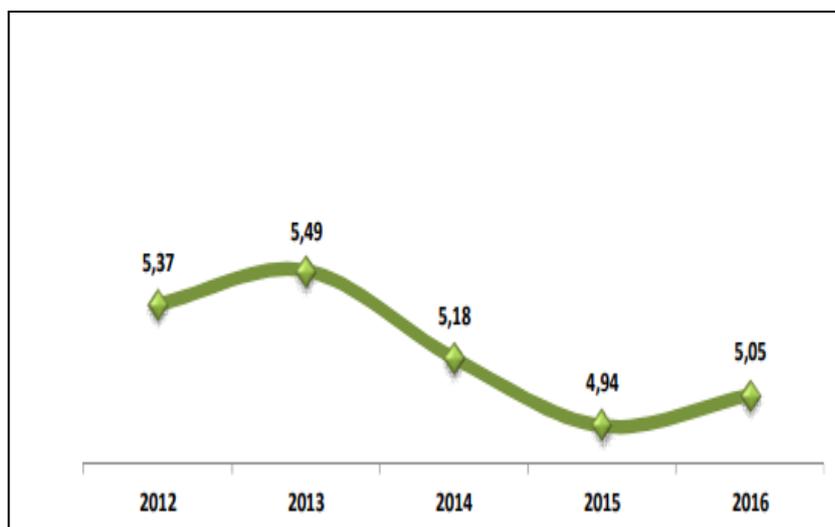
Tabel 4.1. Peningkatan PAD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/ Kota di DIY	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kota Yogyakarta	202.260.820	241.190.745	304.797.499	470.634.760
Kab. Sleman	203.416.683	220.367.231	298.406.947	573.337.599
Kab. Bantul	106.885.124	121.593.862	170.006.171	224.197.864
Kab. Kulonpogo	49.588.455	54.293.141	64.750.332	158.800.563
Kab. Gunungkidul	41.985.405	55.600.362	66.710.860	159.304.338

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat PAD Kota dan Kabupaten di DIY terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah PAD tertinggi diperoleh Kabupaten Sleman dengan pendapatan 573.337.599 ditahun 2014, sedangkan Kota Jogja memiliki PAD sebesar 470.634.760. Kemudian daerah-daerah lainnya seperti kabupaten Bantul memperoleh 224.197.864, Kabupaten Kulonprogo 158.800.563, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 159.304.338. Selain PAD, kondisi ekonomi DIY juga dapat dilihat dari sektor unggulannya, dimana sektor industri pengolahan yang berkontribusi di atas 13%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkisar antara 10% hingga lebih dari 11%, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkisar antara 9% hingga lebih dari 10% (LKPJ DIY, 2016).

Kemudian dari indikator pertumbuhan ekonomi di DIY terus tumbuh fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS DIY 2017

Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2014

Berdasarkan gambar dapat dilihat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 4,94%. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,05%, akan tetapi masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Hal ini didukung oleh sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dimana sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 14,26% diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,32%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,09%, sektor jasa pendidikan sebesar 7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15% (LKPJ DIY, 2016).

B. Gambaran UMKM

Sementara itu, dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di DIY dapat dilihat dari adanya penambahan unit usaha maupun sebaran wilayahnya. Dalam periode tahun 2012 hingga 2016 tercatat ada kenaikan unit usaha tiap tahunnya dengan rata-rata tumbuh sebesar 3,34 persen. Pada tahun 2015, tercatat ada sebanyak 230.047 unit UKM atau meningkat sebesar 4,23 persen dari tahun sebelumnya. Dari sisi jenis usaha menurut sektor, maka UMKM DIY paling banyak bergerak dalam usaha perdagangan dan industri pertanian. Sebaran jumlah UMKM DIY berdasarkan jenis usaha dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha di DIY Tahun
2011-2015**

No.	Uraian	T a h u n				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Usaha Mikro	111.086	111.591	111.912	73.647	73.899
2	Usaha Kecil	50.494	50.999	51.459	39.556	39.755
3	Usaha Menengah	30.296	30.801	31.121	23.641	23.770
Jumlah		191.876	193.391	194.492	136.844	137.424

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2016

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan perbedaan sistem pengolahan data di Kabupaten Kulon Progo yang mengakibatkan perubahan perhitungan data UMKM secara keseluruhan. Dalam perkembangannya usaha mikro mendominasi jumlahnya setiap tahun. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 137.424 unit UMKM. Kabupaten Gunung kidul memiliki jumlah yang paling besar dengan 21.644 unit usaha mikro, 11.674 unit usaha kecil, 5.010 unit usaha menengah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.3. Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha**Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016**

No	Kab / Kota	Pengusaha		
		Mikro	Kecil	Menengah
1	Yogyakarta	10.085	4.656	4.040
2	Sleman	13.017	9.214	4.937
3	Bantul	9.496	5.848	4.125
4	Kulon Progo *)	19.657	8.363	5.658
5	Gunungkidul	21.644	11.674	5.010
	Jumlah	73.899	39.755	23.770

*) Ket : Perubahan Data UMKM Kab. Kulon Progo dengan Surat Nomor. 518/211. tgl.25-3-2014.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2016

Berdasarkan jenis usahanya UMKM dibagi menjadi 4 yaitu aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian. Diketahui dalam kurun waktu 2011 hingga tahun 2015, jenis usaha UMKM keseluruhan mengalami perubahan setiap tahunnya. Dilihat dari jenis usahannya UMKM jenis usaha perdagangan paling mendominasi.

Tabel 4.4. Jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha DIY Tahun 2011-2015

No.	Jenis Usaha	T a h u n				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aneka Usaha	43.471	43.976	44.452	23.996	24.144
2	Perdagangan	57.858	58.363	58.601	43.409	43.553
3	Industri Pertanian	54.991	55.496	55.767	36.847	36.991
4	Industri Non Pertanian	45.655	46.160	46.390	32.592	32.736
	Jumlah	201.975	203.995	205.210	136.844	137.424

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2017

Dilihat dari masing-masing Kota/Kabupaten di DIY, Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah yang paling besar setiap tahunnya. Namun terdapat perubahan data UMKM pada Kabupaten Kulon Progo dengan surat nomor 518/211.

1. Deskripsi Program Pengembangan oleh Koperasi dan UMKM di DIY

Badan penyelenggaran program pengembangan Koperasi dan UMKM adalah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pemerintahan daerah yang berperan sebagai pelaksana kerja/program pemerintah dalam bidang, Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UMKM DIY memiliki tugas untuk mengurus perizinan tempat usaha, penambahan tempat usaha, dan perluasan tempat usaha, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1982, tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan.

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki Visi adalah: “Terdepan dalam pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) yang mandiri dan berdaya saing di ASEAN”. Sedangkan Misi Dinas Koperasi dan UMKM DIY adalah “mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri dan berdaya saing”. Dalam pencapain visi, maka harus dapat mewujudkan misi yang dapat dilakukan dalam beberapa tahapan strategis seperti peningkatan SDM, Penguatan Institusi, Peningkatan Pembiayaan, Peningkatan Produksi dan Pemesanan, Perlindungan Usaha (LAKIP, 2016).

Untuk melanjutkan misi-misi tersebut, maka Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan beberapa program pengembangan meliputi (LAKIP, 2016):

1. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Program yang dijalankan adalah: Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM dan Peningkatan pengelolaan UMKM (DAK)
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui program penumbuhan kewirausahaan baru
3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut: a) Penguatan kapasitas kekoprasian Daerah Istimewa Yogyakarta, b) Penguatan permodalan dan manajemen keuangan koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan c) Peningkatan pengelolaan koperasi (Dana Alokasi Khusus).

C. Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM lahir dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM. PLUT didirikan di seluruh provinsi, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, PLUT KUMKM yang bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto merupakan mitra bagi KUMKM yang ada di DIY, mulai beroperasi pada Maret 2014 dan diresmikan secara langsung oleh Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop RI pada 25 Juni 2014. Pada awal tahun 2016 kelembagaan PLUT KUMKM DIY telah menjadi Seksi di Bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM DIY.

Melihat data pada tahun 2013 menunjukkan, jumlah Koperasi mencapai 2.729 dan UMKM di DIY mencapai 1.500 dengan rincian Kota Yogyakarta 327 UMKM, Kabupaten Sleman 332 UMKM, Kabupaten Bantul 302 UMKM,

Kabupaten Kulon Progo 279 UMKM dan Kabupaten Gunung Kidul 260 UMKM (www.plutjogja.com).

Dengan jumlah tersebut, PLUT DIY sebagai mitra KUMKM berkomitmen memberikan beberapa layanan seperti jasa konsultasi bisnis, pendampingan atau mentoring, promosi dan pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan dan networking serta pustaka entrepreneur. Semangat tersebut berangkat dari motto yang di usung PLUT KUMKM DIY yakni melayani, mendampingi, dan memberi solusi. Adapun Visi Misi PLUT-KUMKM Disepindagkop dan UKM DIY adalah;

VISI:

“Menjadi Pusat Layanan Terpadu utama yang memampukan Koperasi dan UMKM dalam membangun potensi unggulan daerah”

MISI:

1. Menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (*centre for problem solving*).
2. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberi rujukan yang tepat pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan solusi yang spesifik (*centre of referral*)
3. Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (*centre for best practice*).

D. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM pengrajin batik yang mengikuti program pemberdayaan dari PLUT yang berdasarkan data berjumlah 62 pengrajin, yang merupakan perwakilan dari peserta program lain, ada pun karakteristik 62 responden dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis Kelamin/Gender dari 62 pengrajin batik yang mengikuti program pemberdayaan dari PLUT dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.5. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	19	30,65
Perempuan	43	69,35
Total	62	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari hasil penelitian lapangan pada responden, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 43 dari 62 orang atau dengan presentase 69,35% dan peserta dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah lebih sedikit yaitu 19 dari 62 orang atau dengan presentase 30,65%. Dapat dipahami bahwa mayoritas pengrajin batik yang menjadi peserta program adalah ibu-ibu yang berusaha mengembangkan potensi dirinya demi membantu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dari sebelumnya.

2. Karakteristik Berdasarkan Usia

Karakteristik Responden berdasarkan Usia dari 62 jumlah peserta program pemberdayaan ekonomi yang dijadikan responden, dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30 Tahun	20	32,25
31 – 40 Tahun	29	46,78
41 – 50 Tahun	8	12,90
51 – 60 Tahun	5	8,06
Total	62	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang dihimpun penulis, bahwa karakteristik responden pengrajin batik yang mengikuti program pemberdayaan yang diberikan oleh PLUT berdasarkan karakteristik usia, mayoritasnya berusia 31 - 40 tahun dengan jumlah 29 dari jumlah 62 responden atau dengan persentase 46,78%, kemudian yang kedua adalah umur adalah 20-30 tahun dengan frekuensi jumlah yaitu 20 dari 62 responden peserta atau dengan presentase 32,25% dan selanjutnya kelompok usia 41-50 tahun dengan jumlah frekuensi 8 atau dengan persentase 12,90%, sedangkan umur 51-60 tahun mempunyai frekuensi jumlah 5 atau dengan presentase 8,06%. Berdasarkan persentase tersebut pengrajin batik yang mengikuti program pemberdayaan oleh PLUT didominasi kelompok umur 20-40 tahun, karena kelompok umur tersebut masih masih tergolong muda mengingat bahwa kemampuan fisik dan kesempatan mengembangkan diri lebih luas.

3. Pendidikan

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Formal dari 62 jumlah pengraji batik yang mengikuti program pemberdayaan oleh PLUT yang dijadikan responden, dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pendidikan Formal Terakhir Responden

Pendidikan Formal Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Bersekolah	2	3,22
SD	2	3,22
SMP	8	12,90
SMA	28	45,16
Diploma/sarjana/sederajat	22	35,48
Total	62	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil data yang telah dihimpun, karakteristik responden berdasarkan pendidikan formal mayoritas telah lulus Sekolah Dasar yakni kelompok SMA/SMK/SLTA dan Diploma/serjana/sederajat masing-masing dengan frekuensi 28 orang dan 22 orang atau dengan persentase 45,16% dan 35,48%. Sedangkan pada tingkat SMP dengan jumlah frekuensi 8 orang atau persentase 12,90. Kemudian peserta yang lulus ditingkat Sekolah Dasar berjumlah 2 orang begitu pula dengan responden yang tidak mengenyam pendidikan formal berjumlah 2 orang, masing-masing dengan persentase 3,22%.